

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI IV DPR RI
(BIDANG PERTANIAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,
SERTA KELAUTAN)**

Tahun Sidang : 2019-2020
Masa Persidangan : II
Rapat Ke- : 3
Jenis Rapat : Audiensi dengan Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (PINSAR Indonesia)
Sifat Rapat : Terbuka
Hari/Tanggal : Jum'at, 03 April 2020
Waktu : 10.00 s.d. 11.30 WIB
Tempat : -
Acara : Membahas Permasalahan yang Dialami oleh Peternak Unggas Akibat Wabah *COVID-19*.
Ketua Rapat : Drs. H. Hasan Aminuddin, M.Si. (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI/F.NasDem)
Sekretaris Rapat : Drs. Budi Kuntaryo
Hadir : 25 Anggota dari 55 Anggota Komisi IV DPR RI
Hadir Tamu:
1. Arif Karyadi (Sekretaris PINSAR Indonesia);
2. Sugeng Wahyudi (Anggota PINSAR Indonesia);
3. Alvino (Anggota PINSAR Indonesia);
4. Parjoeni (Anggota PINSAR Indonesia);
5. Hidayatur Rahman (Anggota PINSAR Indonesia).

I. PENDAHULUAN

Komisi IV DPR RI menerima audiensi dari PINSAR Indonesia (**secara Virtual**), membahas permasalahan yang dialami oleh peternak unggas sebagai produsen penyedia pangan sumber protein nasional akibat wabah *COVID-19*, dibuka pukul 10.00 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN

1. PINSAR Indonesia menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pemerintah c.q. Kementerian Pertanian melalui Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) melakukan penambahan *grand parent stock* (GPS), yang berpatokan dengan data BPS, bahwa *demand* ayam selalu meningkat. Persoalannya adalah, PINSAR tidak melihat adanya pertambahan kebutuhan ayam.
- b. Industri perunggasan sudah mengalami permasalahan jauh sebelum terjadinya pandemi *COVID-19*, terutama permasalahan kelebihan pasokan ayam dan anak ayam. Hal lain yang menjadi permasalahan adalah terkait tenaga ahli yang diangkat oleh Dirjen PKH berdasarkan amanat Permentan Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyediaan, Peredaran, dan Pengawasan Ayam Ras dan Telur Konsumsi yang dinilai tidak kompeten.
- c. Saat ini terdapat kelebihan 15 juta ekor anak ayam per minggunya atau sebanding dengan 22,950 juta kg daging ayam per minggunya. Hal ini dinilai merepotkan terutama pada saat penurunan daya beli yang mengakibatkan *over suplai*. Meskipun *over suplai* di kandang namun mengalami *shortage* di konsumen. Hal ini juga diperparah dengan adanya disparitas harga antara di tingkat peternak dan konsumen.
- d. Kementerian Pertanian setiap tahun melakukan impor GPS dan besarnya ditentukan oleh Dirjen PKH melalui masukan tim ahli PKH Kementerian Pertanian. Tahun 2020, Pemerintah akan melakukan impor sebesar 45 ribu GPS.
- e. Meminta dukungan kepada Komisi IV DPR RI untuk mengarahkan Pemerintah c.q. Kementerian Pertanian untuk menyerap pasokan ayam dan telur yang *over supply*.
- f. Peraturan Pemerintah terkait perunggasan tidak dijalankan dengan baik, terutama oleh pengusaha dan tidak ada ketegasan dari pemerintah, sehingga mengusulkan untuk menyeimbangkan *supply* dan *demand* serta mengusulkan ada kuota kebutuhan unggas dengan menggunakan hasil unggas di setiap provinsi.
- g. Bahwa permasalahan yang terjadi saat ini merupakan dampak dari impor GPS yang dilakukan pada tahun 2018.
- h. Menyarankan agar di setiap daerah membuat *cold storage* untuk menampung hasil unggas yang berlebih.
- i. Populasi unggas petelur nasional cukup baik setelah melakukan komunikasi secara intensif selama 4 tahun.
- j. Kenaikan kurs cukup menghantam ketersediaan bahan baku pakan, sehingga harga pakan melonjak drastis. Meminta DPR RI memohon ke gabungan pengusaha pakan untuk mengendalikan harga dan jika

terpaksa harus menaikkan harga, sebaiknya menaikkan harga secara bertahap.

- k. Dengan adanya *lockdown* di beberapa daerah yang belum seragam, menyebabkan distribusi telur terganggu. Oleh karena itu, meminta DPR RI membantu mengawal distribusi, sehingga pemerataan dan stabilisasi harga dapat terjaga dengan baik.
- l. Terkait dengan bahan baku pakan impor seperti multivitamin dan asam amino, beberapa kontainer diharuskan dikarantina di beberapa pelabuhan sehingga khawatir mengganggu pasokan dan harga pakan.
- m. Ketersediaan telur akan naik, namun beberapa bulan ke depan ada hambatan masalah peremajaan telur.

2. Tanggapan Komisi IV DPR RI:

- a. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah untuk melihat permasalahan perunggasan ini secara makro atau global dan mencari solusi yang komprehensif, dari hulu hingga hilir agar seluruh pelaku usaha, baik skala besar maupun kecil tidak mengalami kerugian secara signifikan.
- b. Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah c.q. Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, dan BPS untuk melakukan validasi data produksi, data kebutuhan, dan data peternak secara nasional. Selanjutnya meminta Kementerian Pertanian untuk meninjau kembali komposisi tim ahli yang diangkat oleh Dirjen PKH.
- c. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah untuk memperbaiki tata niaga perunggasan yang berpihak kepada peternak rakyat serta meminta Pemerintah untuk meninjau kembali kebijakan importasi GPS hingga pakan ternak. Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk memanfaatkan potensi lokal sebagai alternatif bahan baku pakan.
- d. Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah untuk melibatkan BUMN bidang pangan melalui penugasan dalam hal menyerap dan menyalurkan hasil ternak unggas rakyat dan dalam hal pemenuhan kebutuhan pakan ternak.
- e. Komisi IV DPR RI mengusulkan kepada Pemerintah agar daging kerbau yang diimportasi dari negara India melalui penugasan kepada Perum Bulog diganti dengan daging ayam hasil peternak rakyat.
- f. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah untuk membeli hasil peternak melalui realokasi anggaran yang kemudian dimanfaatkan sebagai komponen bantuan Pemerintah yang akan dibagikan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan pangan kepada masyarakat dalam mengatasi pandemi *COVID-19*.

- g. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah untuk menata regulasi, kebijakan, dan tata niaga perunggasan yang lebih berpihak kepada peternak dan petani lokal.
- h. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah menerbitkan aturan dan regulasi dengan melibatkan pemerintah daerah untuk melakukan pengawalan dalam mengatasi permasalahan tata niaga unggas terutama pada peternak rakyat.
- i. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah untuk bersikap tegas kepada seluruh pelaku usaha perunggasan yang tidak menjalankan peraturan pemerintah atau peraturan menteri yang telah ditetapkan, sehingga tidak terjadi persaingan yang tidak sehat antara perusahaan besar dalam pengadaan GPS, pakan, dan obat-obatan sebagai komponen utama agribisnis perunggasan serta tidak menimbulkan korban pada peternak unggas rakyat.
- j. Komisi IV DPR meminta Pemerintah agar segera menyeimbangkan kelebihan pasokan DOC agar tidak terjadi *over supply* daging ayam di peternak, yang dapat dilakukan melalui skema Bantuan Pemerintah dan meminta Pemerintah untuk menjamin rantai pasok distribusi ternak unggas dari daerah produsen sampai ke tingkat pasar.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 11.30 WIB.

a.n. Ketua Rapat
Sekretaris Rapat,

Ttd.

Drs. Budi Kuntaryo
NIP.196301221991031001